

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Cina terutama dalam bidang perdagangan sudah lama terjalin. Hal ini ditandai dengan adanya kunjungan yang dilakukan oleh presiden Amerika Serikat pada saat itu, yaitu Richard Nixon pada tahun 1972 ke negara Cina dengan menyatakan bahwa Amerika akan menghapus hambatan-hambatan yang terjadi dalam hubungan Amerika Serikat dan Cina terutama di bidang perdagangan (Joseph S. Nye, Robert O. Keohane, 1977). Tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini pun berbanding lurus dengan kebijakan Cina pada tahun 1975 oleh *Deng Xiaoping* yang melakukan reformasi ekonomi yaitu Politik Pintu Terbuka atau *Open Door Politics*. Kebijakan ini bertujuan untuk menerima impor teknologi dan mesin guna menunjang pembangunan industri domestik Cina dalam melakukan modernisasi (Silfiana, 2018). Bahkan, hubungan bilateral antara AS dan Cina dalam bidang perdagangan semakin kuat karena pada tahun 2000, Presiden Bill Clinton menandatangani *US-China Relations Act Treaty* yang dibentuk untuk meningkatkan kerja sama kedua negara serta membantu Cina dalam melakukan perdagangan secara permanen dengan Amerika Serikat (Walter S. Jones, Budiono Kusumohamidjojo, 1993).

Namun pada tahun 2018, hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina menjadi memanas, hal ini di karena kan Donald Trump memberlakukan tarif bea masuk impor secara sepihak sebesar 50-60 miliar Dolar AS atau setara dengan 25% untuk sejumlah produk dari Cina yang diekspor ke Amerika. Tarif ini juga berlaku pada aluminium sebanyak 10% dan baja sebanyak 25% (Cipto, 2018). Alasan Trump melakukan hal tersebut sebagai bentuk proteksionisme yang telah dideklarasikan pada saat masa kampanyenya. Trump

menyatakan bahwa Amerika Serikat mengalami kerugian yang sangat besar akibat ulah Cina yang mencuri kekayaan intelektual Amerika Serikat melalui peretasan jaringan selama satu dekade terakhir. Kekayaan intelektual (*Intellectual Property*) merupakan kekayaan yang berasal dari kemampuan intelektual manusia dengan menciptakan karya-karya yang dihasilkan melalui tenaga, pikiran, curahan waktu, daya cipta, rasa dan karsanya (Krisnani Setyowati, 2005). Kekayaan intelektual terdiri dari berbagai macam jenis, seperti hak cipta (*copyright*), merek dagang (*trademarks*), paten (*patent*), desain industri (*industrial designs*), indikasi geografis (*geographical indications*), dan rahasia dagang (*trade secrets*) (Francklin, 2013). Semua jenis kekayaan intelektual ini mengacu pada hasil kreasi yang berasal dari pikiran, seperti penemuan, simbol, karya seni dan sastra, nama, ataupun gambar yang digunakan untuk perdagangan. Tentu saja kekayaan intelektual mempunyai hak untuk mengatur sistem di dalamnya, hak kekayaan intelektual pun sudah tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) melalui *World Intellectual Property Organization* (WIPO) Pasal 27 yang memberikan hak untuk mendapatkan perlindungan moral dan kepentingan material yang dihasilkan dari ke penulisan ilmiah, sastra atau produksi artistik (WIPO, 2004).

Hubungan Amerika Serikat dan Cina semakin bersitegang setelah Trump meminta *U.S Trade Representative* bersama dengan Robert Lighthizer sebagai penasihat di bidang perdagangan untuk melakukan investigasi terhadap adanya indikasi pencurian kekayaan intelektual melalui peretasan jaringan komputer selama satu dekade terakhir yang dilakukan oleh Negara rekan dagangnya, yaitu Cina. Penyelidikan ini mulai dilakukan oleh Amerika Serikat pada bulan Agustus 2017 dengan cara bilateral maupun multilateral. Bilateral dilakukan oleh Amerika Serikat dengan cara mengirimkan surat kepada Cina untuk melakukan konsultasi terkait penyelidikan kasus ini, termasuk melakukan dialog dengan *the U.S.-China Joint Commission on Commerce and Trade* (JCCT) dan *U.S.-China*

Strategic & Economic Dialogue (S&ED). Sedangkan cara multilateral dilakukan oleh AS dengan melibatkan WTO terkait proses penyelesaian permasalahan yang salah satu penyelidikannya mempertimbangkan apakah Cina sedang melakukan atau mendukung penyusupan secara tidak sah ke jaringan komputer komersial AS atas pencurian kekayaan intelektual, rahasia dagang, atau informasi bisnis rahasia yang diaktifkan secara *cyber* (USTR, 2018).

Setelah 7 bulan melakukan penyelidikan, Maret 2018 USTR resmi mengeluarkan laporan dengan menyertakan beberapa perusahaan Amerika Serikat yang mengalami pencurian kekayaan intelektual berbasis peretasan jaringan komputer oleh Cina, adapun beberapa perusahaan tersebut ialah:

1) *Westinghouse Electric Corporation*

Westinghouse Electric Corporation merupakan perusahaan yang aktif dibidang pengembangan infrastruktur listrik (Westinghouse, 2020). Pada tahun 2010, perusahaan ini sedang melakukan empat pembangunan pembangkit listrik AP1000 di Cina. Pada waktu yang sama, perusahaan ini mengalami pencurian data secara *cyber* sebesar 700.000 halaman email dan lampiran yang berisikan spesifikasi desain dan teknis untuk pipa, penyangga pipa, dan perutean pipa yang nantinya akan diletak di dalam pabrik. Setelah melakukan pencarian pelaku, Amerika Serikat mengidentifikasi 1 orang perwira unit 61398 yang berasal dari *Third Department of the Chinese People's Liberation Army* (3PLA), yaitu Sun Kailiang sebagai pelaku peretasan (USTR, 2018).

2) *United Steel Workers* (USW)

United Steel Workers (USW) merupakan perserikatan pekerja umum untuk berbagai industri, seperti farmasi, logam, bahan kimia, dan lain sebagainya (USW, 2020). Pada tahun 2012, email

6 orang karyawan senior USW termasuk Presiden USW, Leo W. Gerard diretas yang berisi informasi pribadi dan strategi USW terkait sengketa perdagangan (termasuk keputusan USW untuk tidak meminta perpanjangan tarif yang dikenakan pada ban dari Cina). Adapun terdakwa yang melakukan ini adalah Wen Xinyu yang berasal dari *Third Department of the Chinese People's Liberation Army (3PLA)* (Justice, 2014).

- 3) *Allegheny Technology Incorporated (ATI)*
Allegheny Technology Inc (ATI) merupakan perusahaan yang memproduksi bubuk paduan berbahan dasar nikel dan titanium yang digunakan pada mesin jet generasi mendatang (ATI, 2020). Pada tahun 2012, perusahaan ini mengalami pencurian data berupa *username* dan *password* ribuan karyawannya sehingga para pelaku dapat mendapatkan akses secara lebih luas ke komputer perusahaan serta data rahasia perusahaan maupun pribadi. ATI terlibat dalam usaha patungan dengan Baosteel di Shanghai, yang memproduksi gulungan presisi strip baja tahan karat. Pada tanggal 12 April 2012, satu hari sebelum diretas, petinggi ATI bertemu dengan petinggi dari Baosteel Group di Shanghai untuk rapat dewan terkait dengan usaha patungan mereka (USTR, 2018).

Laporan yang telah dikeluarkan secara resmi oleh Amerika Serikat merupakan salah satu alasan Donald Trump melakukan perang dagang dengan Cina melalui kenaikan tarif bea masuk impor dari Cina. Melihat perlakuan yang dilakukan oleh Trump tidak membuat Cina hanya tinggal diam, sejak masuknya surat terkait konsultasi penyelidikan, Menteri Perdagangan Cina, Gao Hucheng menanggapi surat tersebut dengan menentang permulaan investigasi (USTR, 2018). Selain itu Cina mengatakan bahwa sudah sejak tahun 2015 Cina yang diwakili oleh Xi Jinping bertemu dan melakukan kesepakatan

bersama presiden saat itu, Barack Obama terkait pembatasan spionase ekonomi melalui dunia maya untuk kepentingan komersial (BBC, 2015). Hubungan bilateral Amerika Serikat dan Cina memang sudah terjalin lama yang tidak dipungkiri akan menimbulkan beberapa permasalahan terutama di bidang perdagangan antar kedua Negara. Kecurigaan yang dialami oleh Amerika Serikat bukanlah permasalahan yang baru, melainkan sudah terjadi sejak Cina membuka dan mengembangkan pasar domestiknya ke pasar internasional yang dianggap sebagai titik awal pencurian intelektual kekayaan Amerika Serikat (Miller, 2005). Namun, dalam berjalannya hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Cina terutama di jalur ekspor-impor, Amerika baru merasa “pencurian” kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Cina dengan mengambil tindakan perang dagang pada tahun 2018 saat laporan penyelidikan mereka diungkapkan. Kebijakan arogan yang diambil oleh Donald Trump ini semakin menimbulkan tanda tanya karena hanya pada saat kepemimpinan Donald Trump lah, Amerika Serikat melakukan keputusan ini, yang di mana pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah Amerika Serikat selalu menyelesaikan masalah ini dengan cara *door to door*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas yang di mana sifat karakteristik dari Pemerintahan Amerika dalam tuduhan atas pencurian kekayaan intelektual kepada Cina maka dapat diambil satu rumusan masalah ialah “Mengapa Amerika Serikat melakukan tuduhan pencurian kekayaan intelektual kepada Cina pada tahun 2018?”

C. Kerangka Teoritik

Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri

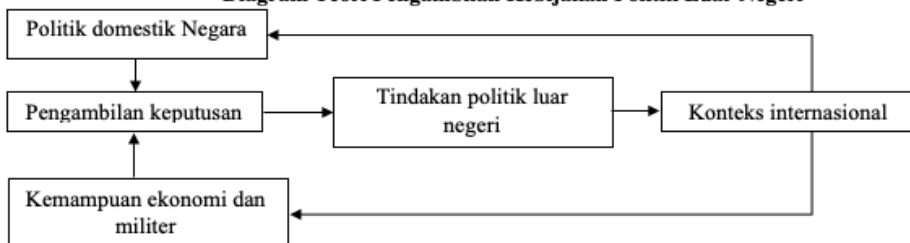
Teori ini merupakan alat dalam menganalisis alasan suatu Negara terkait pengambilan kebijakan luar negerinya. Menurut William D. Collin, politik luar negeri dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori yang dalam praktiknya mengandung sejumlah aktivitas, yaitu kebijakan umum yang terdiri dari serangkaian keputusan melalui tindakan secara langsung dan

pernyataan kebijakan, keputusan administratif yang dibuat oleh pejabat Negara atau birokrasi pemerintah menyangkut tentang pelaksanaan hubungan luar negeri Negeranya, dan yang terakhir ialah keputusan kritis yang menyangkut kondisi khusus suatu Negara yang mana konsekuensinya bersifat jangka panjang karena Negara tersebut merasa terancam (Coplin, 1992). Dapat dikatakan bahwa pengambilan keputusan politik luar negeri suatu Negara merupakan hasil campuran dari kebijakan luar negeri secara umum, kebijakan secara administratif, dan keputusan yang bersifat kritis.

Penjelasan lebih lanjut, William D. Collin menyebutkan bahwa terdapat tiga konsiderans yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu Negara, yaitu kondisi politik domestik, kemampuan ekonomi dan militer, dan konteks internasional yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu Negara. Dalam mempermudah pemahaman teori yang telah disampaikan, dapat dijelaskan dalam bentuk diagram teori pembuatan kebijakan politik luar negeri oleh William D. Collin, sebagai berikut (Coplin, 1992):

Diagram 1.1

Diagram Teori Pengambilan Kebijakan Politik Luar Negeri



Sumber: Willam D. Coplin, Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis, hal.30.

- a) Politik Domestik Negara
Menurut Collin, kebijakan luar negeri merupakan hasil dari proses politik yang melibatkan para aktor

pengambil keputusan baik dari dalam negeri maupun luar negeri pada kondisi tertentu atau yang dapat disebut sebagai *policy influencers*. William D. Collin juga menganalisis dibalik adanya sistem politik yang terbuka dan stabilitas dalam negeri yang menjadi aspek dalam membentuk kebijakan politik luar negeri, faktor budaya juga ikut berperan dalam mendasari tingkah laku politik manusia.

Adapun 4 kategori *policy influencers* menurut William D. Collin, yaitu (Coplin, 2003):

1. *Bureaucratic influencer*, yang berisi dari berbagai individu ataupun organisasi di dalam lembaga eksekutif pemerintah. Aktor ini bertujuan untuk membantu para pengambil keputusan (seperti Raja atau Presiden) dalam merumuskan dan membantu saat melaksanakan kebijakan.
2. *Partisan influencer*, yang bertujuan untuk mengalihbahasakan tuntutan-tuntutan masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah menjadi tuntutan yang politis.
3. *Interest influencer*, yang terdiri dari bergabungnya sekelompok orang karena mempunyai kepentingan yang sama untuk mendapat dukungan dari kelompok pengambil keputusan lainnya. Walaupun berbeda dengan partai politik, kehadiran kelompok ini dibutuhkan sebagai sumber dukungan bagi aktor lainnya.
4. *Mass influencer*, mengacu kepada opini publik yang dibentuk oleh media massa. Opini yang disampaikan pun tidak jarang menjadi pertimbangan bagi para aktor pengambil keputusan lainnya untuk mengeluarkan kebijakan luar negeri.

Jika dapat diamati, kategori *Bureaucratic influencer* menjadi salah satu tipe yang tepat dalam menganalisis politik domestik Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald

Trump. Hal ini di karena kan sistem pemerintahan yang dikuasai oleh presiden sebagai pengambil keputusan tentu saja tidak terlepas dari pengaruh lembaga eksekutif pemerintah dalam membantu serta merumuskan kebijakan yang dikeluarkan presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump.

Selain itu, Donald Trump sebagai presiden Amerika yang berasal dari partai republik terkenal memiliki ideologi konservatif yang memandang bahwa suatu negara harus melindungi warga negaranya dari gangguan negara lain, sehingga negara lain dianggap musuh atau kompetitor (Fadillah, 2020). Hal ini lah yang membuat Donald Trump cenderung proteksionisme dalam menjalankan politik domestik negaranya di karena kan faktor budaya yang mendasari tingkah laku politiknya.

b) Kemampuan Ekonomi dan Militer

Kemampuan ekonomi dan militer merupakan dua variabel yang menjadi komabilitas suatu negara dalam menopang politik luar negerinya. Kedua variabel ini memiliki hubungan yang paralel, semakin kuat kemampuan perekonomian suatu negara maka kapasitas kekuatan militernya semakin meningkat. Menurut William D. Collin, kemampuan ekonomi sebuah negara dapat di ukur melalui *Gross National Product* (GNP) yang relatif tinggi serta kapasitas produksi barang dan jasa yang bervariasi (Coplin, 2003). Sedangkan kemampuan militer dapat di ukur melalui kapasitas penggunaan kekuatan militer, tingkat ketergantungan dengan negara lain, dan stabil atau tidaknya internal serta kemampuan militer suatu negara (Coplin, 1987). Jika dipaparkan, kekuatan ekonomi dan militer Amerika Serikat sudah tidak dapat di ragukan lagi. Pada tahun 2018, *Gross National Product* (GNP) Amerika Serikat tercatat sebanyak 20.637 triliun Dolar AS (Bank, 2018) dengan anggaran pertahanan militer tertinggi di dunia sebesar 649 miliar Dolar AS melalui laporan resmi *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) (Setiawan, 2019). Apabila dianalisis

lebih lanjut, Amerika Serikat yang tergolong sebagai negara maju mempunyai kapasitas yang lebih besar dalam menyerang negara lain. Pemberlakuan kenaikan tarif impor produk Cina yang di indikasikan karena adanya pencurian kekayaan intelektual membuat Amerika Serikat lebih unggul dalam menghadapi permasalahan yang terjadi.

c) Konteks Internasional

Menjelaskan alasan perilaku tertentu suatu negara terhadap negara lain. William D. Collin mengatakan terdapat 3 elemen penting dalam melihat pengaruh konteks internasional terhadap kebijakan politik luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis, dan politis (Coplin, 2003). Dapat dikatakan faktor geografis suatu negara masih memiliki peran penting dalam terjadinya hubungan lintas negara sebagai jalan terciptanya hubungan ekonomi dan politik. Dalam konteks internasional sebuah negara dapat mengategorikan negara lainnya sebagai teman atau sebagai lawan. Amerika Serikat sebagai negara adikuasa melihat tindakan Cina menjadi sebuah ancaman bagi negaranya yang dapat menggantikan posisinya. Hal tersebut dapat dilihat dari kelihaihan Cina dalam melakukan peretasan kekayaan intelektual milik beberapa perusahaan Amerika Serikat yang membuat Amerika Serikat mengalami kerugian yang cukup besar. Cina juga melihat potensi dalam negaranya dengan mengembangkan teknologi serta infrastruktur agar dapat dilihat baik di mata internasional. Oleh karena itu, Amerika Serikat mengambil keputusan untuk menaikkan tarif impor terhadap Cina agar memberatkan Cina yang melakukan kegiatan ekspor dan impor sebagai pemasukan terbesarnya serta membuat Amerika lebih unggul di mata internasional.

D. Hipotesis

Dari beberapa penjelasan di latar belakang dan kerangka teori di atas maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa, fenomena terkait tuduhan pencurian kekayaan intelektual yang diberikan Amerika Serikat kepada Cina yaitu:

1. Adanya dukungan dari birokrasi yang mempengaruhi kebijakan tersebut;
2. Besarnya kerugian Amerika Serikat Pasca terjadinya pencurian kekayaan Intelektual melalui peretasan jaringan oleh Cina;
3. Perubahan Kebijakan politik Amerika Serikat terhadap Cina dalam Segi Ekonomi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini, dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model eksplanatif analisis, yaitu bersifat menjelaskan secara rinci pada pokok permasalahan dan menjelaskan secara keseluruhan variabel-variabel, dari hasil yang telah diamati berdasarkan pada kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini yang lebih ditekankan pada Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Cina dalam pencurian kekayaan intelektual pada tahun 2018. Sasarannya memberikan hasil serta jawaban atas pertanyaan-pertanyaan apa bagaimana, dan mengapa terhadap kejadian politik international.

2. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai teknik pengambilan data, penulis menggunakan data Sekunder dan Primer yang akan dipakai dalam penelitian ini, yaitu menggunakan data-data yang berasal dari: dokumen-dokumen, jurnal ilmiah, surat kabar atau buku-buku dan pernyataan dalam konferensi-konferensi pers yang berkaitan dengan tema penelitian tentang Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Cina dalam pencurian kekayaan intelektual 2018.

3. Analisis Data

Setelah adanya data dan fakta yang diperoleh maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis data sesuai dengan fakta-fakta yang dihadirkan dalam penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini dibatasi pada Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Cina dalam pencurian kekayaan intelektual tahun 2018.

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian tentang Tuduhan Amerika Serikat atas Pencurian Kekayaan Intelektual melalui Peretasan Jaringan oleh Cina tahun 2018 yaitu:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan Kebijakan politik Luar negeri Amerika terhadap Cina;
- b. Untuk mengetahui bagaimana reaksi Cina dalam menanggapi tuduhan tersebut.

Sedangkan manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini ada 3 yaitu untuk Pribadi, Akademis, dan Masyarakat:

1. Untuk Pribadi

- a. Sebagai tugas Akhir untuk menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu di Department Hubungan International Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- b. Sebagai sarana Penulis untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama di perkuliahan.

2. Akademis

- a. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat tentang Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Cina dalam pencurian kekayaan intelektual;
- b. Sebagai bahan referensi dan acuan untuk penelitian yang memiliki pembahasan yang sama di masa mendatang.

3. Masyarakat

- a. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat tentang Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Cina dalam pencurian kekayaan intelektual;
- b. Sebagai bahan diskusi bagi masyarakat khususnya tentang arah kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Cina dalam pencurian kekayaan intelektual tahun 2018;
- c. Sebagai referensi bagi masyarakat yang berminat dalam mengkaji dan menelaah tentang kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Cina dalam pencurian kekayaan intelektual tahun 2018.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan dari Skripsi terdiri dari empat bab yang di mana masing-masing bab terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisikan ketentuan pokok dalam penulisan Skripsi terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka teori/pemikiran, hipotesis, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan;

Bab II: Kebijakan Politik Amerika Terhadap Cina Dalam Kekayaan Intelektual

Bab ini berisikan penjelasan secara umum terkait kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Amerika Serikat, kebijakan politik Luar negeri Amerika Serikat di bawah Kepemimpinan Donald Trump, hingga Hubungan Amerika Serikat Dengan Cina.

Bab III: Pencurian HKI Yang Dilakukan Cina Terhadap Amerika Serikat

Bab ini menjelaskan alasan mengapa Amerika Serikat melakukan tuduhan pencurian atas kekayaan intelektual oleh

Cina melalui peretasan jaringan. Serta juga akan menganalisis pencurian kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Cina.

Bab IV: Kesimpulan

Bab terakhir dari penulisan skripsi ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.